

HALAMAN JUDUL



**IMPLIKASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Riska., S.H.
11000119410096**

PEMBIMBING :

Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

Peneliti

Riska., S.H.

NIM. 11000119410096

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196606071992031001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

- Nama : Riska, S.H.
- NIM : 11000119410096
- Program Studi : Magister Ilmu Hukum
- Judul Tesis : **Implikasi *Presidential Threshold* Terhadap Hak Konstitusioanl Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia**

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Pada Hari Tanggal 2021 dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. ()

Penguji I : Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. ()

Penguji II : Dr. Amalia Diamantina, S.H.,M.Hum. ()

Ditetapkan Di Semarang

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska, S.H.
NIM : 11000119410096
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Kajian : Hukum Kenegaraan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah/Tesis saya yang berjudul **Implikasi *Presidential Threshold* Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia**. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, bahkan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditetapkan Di
Semarang, 2021
Yang Menetapkan,

Riska, S.H.
NIM. 11000119410096

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sejujur-sejujurnya dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) baik dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua referensi dan informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber Penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai Penulis

Semarang, 2021
Yang membuat pernyataan,

Riska, S.H
NIM. 11000119410096

MOTTO

Kesulitan dalam hidup tidak akan dirasakan bagi orang yang
ingin berusaha dan berjuang !!!

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Wr Wb, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, atas nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **Implikasi *Presidential Threshold* Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia**. Penulis mengambil judul penelitian tesis ini dengan pertimbangan bahwa, *presidential threshold* dalam pemilu presiden sangat krusial, maka dari itu diperlukan pengkajian dan analisis yang mendalam agar dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun sistem demokrasi pemilu presiden yang akan datang. Sejauh pengamatan penulis selama dua semester perkuliahan, telah membuka pemikiran penulis untuk meneliti tesis ini. Penulis memandang ada permasalahan yang cukup krusial yang harus dituntaskan dalam mekanisme pemilu presiden. Sehingga penulis menilai bahwa dalam menulis karya ilmiah ini, diperlukan berbagai dukungan baik secara materil maupun moril.

Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku rektor Universitas Diponegoro yang telah menerima dan menjadikan saya sebagai bagian dari keluarg besar Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menerima saya untuk menimbah ilmu sekaligus menjadikan saya sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, juga merupakan salah satu tim penguji tesis saya, oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran yang membangun yang telah diberikan.
3. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam proses perkuliahan sampai pada tahap pengurusan tesis ini.
4. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.Hum., selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sekaligus beliau juga merupakan salah satu tim penguji saya pada Ujian Hasil Penelitian (SHP), penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun yang telah diberikan.
5. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing saya. Penulis tahu persis *basic* keilmuan beliau sesuai dengan judul tesis yang saya angkat. Serta penulis yakin bahwa beliau berkompeten dan mampu mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Banyak hal baru yang saya dapatkan selama dibimbing oleh beliau. Selain itu, sosok beliau yang tenang dan penyabar dalam menghadapi mahasiswa bimbingannya, serta sosok keibuan beliau yang membuat penulis merasa nyaman. Oleh karena itu, penulis sangat berterima

kasih kepada Ibu Dr. Fifiana, atas kesempatan waktu dan ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan.

6. Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan masukan yang membangun pada ujian review proposal, penulis mengucapkan terima kasih.
7. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhususnya untuk semua dosen yang telah mendidik dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis, baik secara langsung di ruang kelas maupun tidak langsung melalui daring.
8. Seluruh staf kepegawaian Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah melayani seluruh pengurusan administrasi sejak pendaftaran sampai pada pengurusan tesis penulis.
9. Seluruh kawan-kawan mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2019, terkhususnya kelas Hukum Kenegaraan, penulis merasa beruntung berada di lingkungan kawan-kawan mahasiswa kenegaraan yang jumlahnya 17 orang. Penulis sangat merindukan kebersamaan di kelas dikala belum diterapkan kuliah *online* (kulon). Sejak adanya *covid-19*, pertengahan maret 2020 lalu, kami dirumahkan, jadi proses perkuliahan dilakukan masing-masing di rumah. Sehingga membuat kami jarang bertemu, dan berdiskusi panjang di ruang kelas 113. Banyak pengalaman

yang saya dapatkan selama dipertemukan dengan kawan-kawan yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Saya merasa diantara kami saling melengkapi satu sama lain selama kami dipertemukan.

10. Sahabat-sahabat terdekat saya yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan, apalagi saya sebagai mahasiswa yang merantau jauh dari Makassar ke Semarang, tentu membutuhkan sahabat yang bisa membantu saya dalam segala hal. Terima kasih untuk sahabat-sahabat ku, Nana yang selalu menemani saya, sekaligus sebagai teman sharing seputar perkuliahan. Ntika sosok yang unik dan lucu yang selalu mecairkan suasana. Doris yang sangat pengertian dan loyal terhadap teman-temannya, saya banyak mendapatkan ilmu dari dia yang bersosok cerdas, rajin beli buku dan baca buku. Bill, temanku sama-sama dari Makassar yang sudah menganggap saya sebagai saudara diperantauan. Rais, adek yang lucu, ambisi dalam dunia pendidikan, semangat dan mempunyai jiwa bisnis yang luar biasa, dia adalah sahabat yang selalu ingin menyenangkan teman-temannya.
11. Ucapan terimakasih untuk semua teman-teman, keluarga dan pihak manapun yang selalu memberikan support kepada saya.
12. Terakhir, ucapan yang sangat spesial untuk mama dan bapak, kakak dan adik ku yang selalu memanjatkan doa untuk saya, yang selalu mendukung setiap langkah dan keputusan dalam hidup saya. Terima kasih tak terhingga untuk keluarga tercinta, salam rindu dari saya yang sudah satu tahun lebih tidak pulang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, melalui karya tulis ini, semoga dapat dicerna dan diterima dengan baik. Apabila terdapat kekeliruan berfikir di dalamnya, maka penulis berharap kepada pihak mana pun untuk memberikan kritik dan sarang yang sifatnya membangun. Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangsi pemikiran untuk orang banyak, dan untuk mereka yang ingin meneliti masalah pemilu di Indonesia. Terima kasih.

ABSTRAK

Prinsip pemilihan umum (pemilu) demokrasi di Indonesia merupakan apa yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu presiden dan wakil presiden

merupakan salah satu agenda wajib dilaksanakan untuk membentuk sistem pemerintahan. Pasca reformasi, pemilu presiden secara langsung telah dilakukan, seiring perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, maka mekanisme di dalamnya juga terus mengalami perubahan. Salah satu mekanisme yang paling menonjol dalam tahap pelaksanaan pemilu presiden adalah persoalan ambang batas (*presidential threshold*). Maka dari itu, penelitian ini fokus terhadap permasalahan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dalam penerapan *presidential threshold*, yaitu bagaimana pengaruh *presidential threshold* dalam pemilu presiden terhadap hak konstitusional warga Negara, dan bagaimana mekanisme pemilu presiden yang ideal di Indonesia. Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain; pertama, pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemilu khususnya pemilu presiden. Kedua, pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Ketiga, pendekatan perbandingan dengan Negara lain.

Adapun hasil penelitian yang dapat diuraikan adalah pertama, penerapan *presidential threshold* dalam pemilu presiden mempunyai pengaruh terhadap hak konstitusional warga Negara. Karena syarat pengusungan calon presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara di Dewan perwakilan rakyat (DPR) minimal 20% atau 25% suara sah secara nasional. Angka yang cukup besar tersebut, sulit dipenuhi oleh sebagian partai politik kecil, sehingga hak partisipasi dalam pemilu presiden terbatas. Dengan adanya *presidential threshold* tersebut, warga Negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya, stagnan pada dua atau tiga pilihan calon saja. Kedua, pemilu presiden dahulu telah mengatur mekanisme *presidential threshold* yaitu 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Seiring perkembangan, *presidential threshold* berubah menjadi 20% suara DPR atau 25% perolehan suara secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, konsep ideal mekanisme *presidential threshold* adalah pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengurangi angka *presidential threshold*. Agar tidak terjadi dominasi elit politik yang berkuasa.

Kata Kunci : Presidential Threshold; Pemilu Presiden; Ketatanegaraan

ABSTRACT

The principle of democratic general election (election) in Indonesia is what is contained in the values of Pancasila and is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Presidential and vice presidential elections are one of the

mandatory agendas to be implemented to form a government system. Post-reform, direct presidential elections have been held, along with the development of the Prevailing Laws, the mechanisms in it also continue to change. One of the most prominent mechanisms in the implementation stage of the presidential election is the issue of the presidential threshold. Therefore, this study focuses on the problem of the effect of implementing the presidential threshold, namely how the presidential threshold in the presidential election affects the constitutional rights of citizens, and how the ideal presidential election mechanism in Indonesia. The purpose of this paper is to identify and analyze the fundamental problems in this study.

The research method used is normative juridical, using several approaches, including; first, the approach to the Laws and Regulations relating to elections, especially the presidential election. Second, the conceptual approach, using theories and expert opinions to analyze the problems being studied. Third, the comparative approach with other countries.

The research results that can be described are first, the application of the presidential threshold in the presidential election has an influence on the constitutional rights of citizens. Due to the requirements for the nomination of a presidential candidate, political parties or coalitions of political parties must have a minimum of 20% or 25% of votes in the People's Representative Council (DPR) or 25% of the national valid votes. This sizeable figure is difficult to fulfill by some small political parties, so that the right to participate in presidential elections is limited. With the presidential threshold, citizens in exercising their constitutional rights were stagnant in only two or three choices of candidates. Second, the presidential election has previously regulated a presidential threshold mechanism, namely 15% of the DPR's votes or 20% of the valid national votes as stipulated in Law Number 23 of 2003 concerning the General Election of the President and Vice President. Along with developments, the presidential threshold changed to 20% of the DPR's vote or 25% of the vote acquisition nationally based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, the ideal concept of the presidential threshold mechanism is that the Indonesian government should consider reducing the presidential threshold. So that there is no domination of the ruling political elite.

Keywords: Presidential Threshold; Presidential Election; State administration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
----------------------------	----------

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
<i>MOTTO</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Sifat Penelitian.....	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Analisis Data	33
G. Sistematika Penelitian	33
H. Orisinalitas Penelitian.....	36

BAB II	47
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemilihan Umum	47
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	60
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Presidential Threshold</i>	62
BAB III.....	74
A. Pengaruh Penerapan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Sistem Pemilu Presiden Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara.	74
B. Mekanisme Pemilu Presiden Yang Ideal Di Indonesia.....	90
BAB IV	116
A. KESIMPULAN	116
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119